

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (HAW Widjaja, 2002 : 76).

Setelah diberlakukannya Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini adalah: Pasal 4 ayat 3 “Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pemekaran wilayah administratif menjadi kecenderungan baru dalam struktur pemerintahan di Indonesia. k. Fitrani *et al.* (2005) menyatakan bahwa pemekaran telah membukapeluang terjadinya *bureaucratic and political rent-seeking*, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungannya, baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri.

Pemekaran daerah secara intensif berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan, perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pemekaran justru menjadi pemicu bagi kehancuran perekonomian masyarakat dan menimbulkan daerah-daerah miskin baru.

Dalam Peraturan Pemerintah 19 tahun 2008 mengatur mengenai proses pembentukan daerah. Pembentukan kecamatan sebagaimana di maksudkan pada pasal 2 yakni kecamatan di bentuk di wilayah kabupaten/kota dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah, pembentukan kecamatan dapat berupa pemekaran 1 kecamatan menjadi 2 kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Harus memiliki administrative, teknis dan fisik wilayah.

1. Syarat administratif pembentukan kecamatan sebagaimana di maksudkan dalam Peraturan Pemerintah pada pasal 3 nomor 19 tahun 2008 meliputi :
 - a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 tahun.
 - b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan di bentuk menjadi kecamatan minimal 5 tahun.
 - c. Keputusan badan permusyawaratan desa (BPD) atau nama lain untuk desa dan forum komunikasi kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.
 - d. Keputusan kepala desa atau nama lain untuk desa dan keputusan lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.
 - e. Rekomendasi Gubernur.

2. Syarat fisik kewilayahan sebagaimana di maksudkan dalam Peraturan Pemerintah pada pasal 3 nomor 19 tahun 2008 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota,sarana dan prasarana pemerintahan, meliputi :
 - a. Cakupan wilayah untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa/kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/kelurahan.
 - b. Lokasi calon ibukota memperhatikan aspek tata ruang ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis,kependudukan,sosial ekonomi,sosial politik,dan sosial budaya.
 - c. Sarana dan prasarana pemerintahan meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat di gunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Persyaratan teknis sebagaimana di maksud dalam pasal 3 meliputi :
 - a. Jumlah penduduk
 - b. Luas wilayah
 - c. Rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan.
 - d. Aktivitas perekonomian.
 - e. Ketersediaan sarana dan prasarana.

Bagi Provinsi Riau pemekaran wilayah/daerah di lakukan melalui Undang-Undang No.53 tahun 1999 tentang pemekaran kabupaten / kota seperti Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kuantan Singing, Karimun, Natuna, dan Batam. Pemekaran wilayah ini akan mendekatkan rentang birokrasi daerah dengan rakyatk karena kalau

pemerintah berada dalam jangkauan masyarakat, maka pelayanan terhadap public akan lebih mudah di lakukan.

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan. Pada saat Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sebuah Kabupaten definitif yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan dengan 151 pemerintahan Desa/Kelurahan, sebagai berikut:

1. Kecamatan Kuantan Tengah.
2. Kecamatan Singingi.
3. Kecamatan Kuantan Mudik.
4. Kecamatan Kuantan Hilir.
5. Kecamatan Cerenti.
6. Kecamatan Benai.

Sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi terhitung sejak tanggal 8 Oktober 1999 sampai dengan 8 Oktober 2000 adalah Drs. H. Rusdji S. Abrus. Pada bulan Oktober 2000 diadakan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang pertama dipilih oleh anggota legislatif, sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah pasangan Drs. H. Rusdji S. Abrus dengan Drs. H. Asrul Ja'afar periode 2001- 2006. Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.24-134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Selang waktu 2 (dua)

bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.24-316 tanggal, 20 Agustus 2001. Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 (enam) kecamatan dimekarkan menjadi 12 (dua belas) kecamatan, kecamatan yang baru dimekarkan tersebut adalah :

1. Kecamatan Hulu Kuantan.
2. Kecamatan Gunung Toar.
3. Kecamatan Singingi Hilir.
4. Kecamatan Pangean.
5. Kecamatan Logas Tanah Darat.
6. Kecamatan Inuman

Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan sentajo raya tentang pembentukan Kecamatan Sentajo Raya di sah kan melalui sidang pari purna di pimpin oleh ketua DPRD Muslim S.sos di samping siding pari purna wakil ketua Sudioyono dan Elpius serta mayoritas anggota DPRD kuantan singingi, selain itu pari purna di hadiri bapak bupati kuantan singingi H.Sukarmis dan wakil bupati Drs.H.Zulkifli Msi sebelum di sahkan panitia khusus DPRD menyampaikan pendapat melalui juru bicara nya yang di sampai Rustam Evendi S.sos

Tujuan pemekran Sentajo Raya ialah melihat dari sisi positif nya adalah untuk menyelesaikan masalah ketertinggalan dari daerah lain.Hanya yang pasti dengan pemekaran Kecamatan Sentajo Raya ini mempunyai peluang untuk lebih di perhatikan dan keluar dari ketertinggalan. Bagaimana

tidak dengan menjadi daerah otonomi maka pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat dan memiliki anggaran yang di kelola sendiri yang dapat di gunakan untuk membangun wilayah tersebut. Sewaktu bergabung dengan daerah induk boleh jadi alokasi anggaran kewilayah tersebut sangat kecil.

Dalam pandangan penulis, pemerintah yang di desentralisasikan bertujuan untuk meningkatkan inisiatif lokal, mendorong partisipasi daerah yang ada agar lebih besar dan luas, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan partisipasi politik, sosial dan budaya masyarakat dalam rangka pencapaian kesejahteraan dan rasa keadilan dalam masyarakat. Kondisi kehidupan masyarakat di daerah sentajo khususnya sebelum di mekarkan menjadi kecamatan sangatlah memprihatikan jarak dengan ibu kota kecamatan sekitar 15 Km sehingga segala urusan pelayanan memakan waktu yang lama di tambah lagi

Berdasarkan persyaratan di atas maka di usulkan pemekaran Kecamatan Sentajo Raya karena sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 78/7 sehingga di bentuk tim pemekaran Kecamatan Sentajo Raya. Kecamatan sentajo raya ini di resmikan menjadi pada tanggal 10 bulan oktober 2012. Profil wilayah, Kecamatan sentajo raya adalah kecamatan dari pemekaran kecamatan kuantan tengah dan benai yang di tetapkan berdasarkan peraturan daerah No 24 tahun 2012 tentang pembentukan kuantan hilir seberang, kecamatan sentajo raya dan kecamatan pucuk rantau, di kabupaten kuantan singingi. Ibu kota sentajo raya terletak di koto sentajo. Jumlah desa dan jumlah penduduk di kecamatan sentajo raya 2013 dapat kita lihat dari table berikut :

Tabel 1.1.
Jumlah Desa dan Jumlah Penduduk di Kecamatan Sentajo Raya
Kabupaten Kuantan Singingi 2013

| No | Desa/Kelurahan | Jumlah Penduduk | Jumlah Dusun/ Lingkungan | RT | RW |
|----|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----|----|
| 1 | Pulau komang sentajo | 1,631 | 3 | 12 | 8 |
| 2 | Muaro Sentajo | 2,358 | 3 | 8 | 4 |
| 3 | Koto Sentajo | 1,243 | 2 | 8 | 4 |
| 4 | Kampung Baru Sentajo | 2,560 | 3 | 12 | 6 |
| 5 | Pulau Kopung Sentajo | 1,601 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Teratak Air Hitam | 995 | 3 | 6 | 3 |
| 7 | Seb.T.air Hitam | 293 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Parit.T.Air Hitam | 709 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Jalur Patah | 1,301 | 3 | 6 | 3 |
| 10 | Geringging Baru | 2,049 | 2 | 16 | 8 |
| 11 | Marsawa | 3,739 | 5 | 22 | 10 |
| 12 | Langsat Hulu | 3,100 | 4 | 20 | 9 |
| 13 | Muara Langsat | 3,326 | 4 | 18 | 9 |
| 14 | Geringging Jaya | 1,743 | 4 | 16 | 8 |
| 15 | Kel.Beringin Jaya | 2,049 | 3 | 15 | 6 |
| | Jumlah | 28,704 | 48 | 168 | 87 |

Sumber : Kantor Camat Sentajo raya, 2014

Dari data jumlah desa dan data jumlah penduduk di kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi pada tahun 2013 berjumlah 15 desa dengan jumlah penduduk 28,704 jiwa.

Pemerintah kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah yang ada di atas nya yakni pemerintah kabupaten yang berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin dengan melakukan pemekaran kecamatan akan memperpendek rentang waktu penyelesaian pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga hal nya dalam pemekaran sentajo raya. Dengan telah di mekarkan nya kecamatan sentajo raya ini akan memepermudah masyarakat untuk berurusan dengan pemerintah seperti

pengurusan pembuatan KTP, KK, SKAW (surat keterangan ahli waris) akan lebih mudah, dan juga pelayanan kesehatan seperti adanya puskesmas untuk melayani masyarakat. Adapun bentuk-bentuk dampak sosial ekonomi bagi masyarakat setelah pemekaran ini seperti :

Table 1.2.
Bentuk-Bentuk Dampak Sosial Ekonomi Bagi Masyarakat Setelah
Pemekaran Kecamatan Sentajo Raya.

| Dampak Sosial Ekonomi | Sebelum Pemekaran | Jumlah | Sesudah Pemekaran | Jumlah |
|------------------------------|---|---|---|---|
| Pelayanan | KTP KK Pendidikan Kesehatan | 600 4228 1125 36 | KTP KK Pendidikan Kesehatan | 672 4384 1342 72 |
| Pembangunan | Sekolah a. TK b. SD c. SMP d. MTS e. SMA Jalan Kantor Desa Puskesmas Pasar | 12 20 6 1 1 4 9 1 1 | Sekolah a. TK b. SD c. SMP d. MTS e. SMA Jalan Kantor Desa Puskesmas Pasar | 14 22 7 1 2 6 6 2 2 |
| Pendapatan Asli Daerah | Retribusi Pajak | Rp.15.356.000,00 Rp.1.229.000,00 | Retribusi Pajak | Rp.16.672.000,00 Rp.1.690.000,00 |

Sumber : Kantor Camat Sentajo Raya 2014

Seperti tabel di atas di jelaskan bahwa pelayanan meningkat setelah terjadi nya pemekaran kecamatan ini tampak jelas pada tabel di atas, sebelum pemekaran pelayanan KTP ada 600 setelah terjadinya pemekaran menjadi 672, KK sebelum pemekaran ada 4228 setelah terjadinya pemekaran ada 4384 KK, dan juga pelayanan di bagian pendidikan seperti guru sebelum pemekaran ada 1125 setelah terjadi nya pemekaran kecamatan jumlah guru meningkat menjadi 1342, begitu juga dengan pelayanan di bagian kesehatan seperti

perawat dan bidan sebelum pemekaran kecamatan ada 36 sekarang setelah pemekaran menjadi 72.

Pada bagian pembangunan, tampak jelas juga meningkat nya pembangunan setelah pemekaran kecamatan sentajo raya, seperti di pembangunan sekolah sebelum pemekaran gedung sekolah TK 12 sekarang setelah pemekaran menjadi 14 gedung TK, gedung sekolah SD sebelum pemekaran ada 20 sekarang setelah pemekaran menjadi 22 gedung sekolah SD, gedung sekolah SMP sebelum pemekaran ada 6 sekarang setelah pemekaran menjadi 7 gedung sekolah SMP, gedung sekolah MTS sebelum atau setelah pemekaran tidak ada penambahan gedung sekolah tetap 1, gedung sekolah SMA sebelum pemekaran ada 1 sekarang setelah pemekaran menjadi 2 gedung sekolah di tingkat SMA. Begitu juga pada pembangunan jalan sebelum terjadi nya pemekaran di kecamatan ini ada 4 pembangunan jalan sekarang setelah pemekaran pembangunan jalan menjadi 6, pembangunan kantor desa sebelum pemekaran ada 9 jadi setelah di tambah 6 pembangunan kantor desa, pembangunan puskesmas sebelum pemekaran ada 1 sekarang setelah di mekarkan menjadi 2 puskesmas di kecamatan sentajo raya ini, pembangunan pasar sebelum pemekaran pasar ada 1 setelah pemekaran menjadi 2 pasar pada kecamatan sentajo raya ini.

Pada bagian pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah pemekaran juga mengalami peningkatan seperti di bagian retribusi sebelum pemekaran ada Rp.15.356.000.00 sekarang setelah pemekaran menjadi Rp. 16.672.000.00 per tahun nya, dan juga pada bagian pajak sebelum pemekaran Rp.1.229.000.00 setelah pemekaran menjadi Rp.1.690.000.00 per tahun nya.

Seperti pembangunan sekarang pada kecamatan sentajo raya ini sudah menuju ke efektifan meski masih ada beberapa pembangunan jalan, perbaikan” gedung sekolah di beberapa desa masih belum efektif masih dalam proses pembangunan dan juga dalam pembangunan puskesmas, untuk dalam pembangunan kantor desa di setiap desa sudah efektif, dan juga pembangunan rumah penduduk di setiap desa/kelurahan di kecamatan sentajo raya.

Di dalam konsep pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi ada beberapa indicator seperti :

a. Pendapatan per kapita

Pendapatan per kapita seringkali digunakan pula sebagai indikator pembangunan selain untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi antara Negara-negara maju dengan Negara sedang berkembang. Pendapatan per kapita selain dapat memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di berbagai Negara juga dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antara berbagai Negara.

b. Tingkat kesejahteraan masyarakat

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, ada sebuah indeks gabungan yang dikenal dengan Physical Quality of Life Index (PQLI) dan Indeks Kualitas Hidup (IKH).

c. Indeks kualitas hidup

Indeks ini diperkenalkan oleh Morris D. Morris. Indeks Kualitas Hidup (IKH) terdiri dari 3 indikator yakni, tingkat harapan hidup, angka kematian, dan tingkat buta huruf.

d. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu indikator yang digunakan dalam mengukur pembangunan ekonomi suatu Negara.

e. Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi yang harus dipenuhi demi keberlangsungannya kehidupan bermasyarakat. Indikator tingkat kesehatan dapat dilihat dari rata-rata hari sakit dan ketersediaannya fasilitas kesehatan. Ketika terpenuhinya pembangunan ekonomi berupa kesejahteraan dalam bidang kesehatan, dapat dilihat dari beberapa indikasi berupa tingkat mortalitas yang rendah, angka pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan angka harapan hidup yang tinggi.

f. Kriminalitas

Pada dasarnya Negara maju memiliki tingkat kriminalitas yang rendah, hal ini disebabkan sudah lengkapnya alat keamanan Negara yang digunakan oleh Negara tersebut.

Dalam pelayanan pada kecamatan sentajo raya ini setelah sebelum dan sesudah pemekaran kecamatan yang ada di daerah ini sangat jauh berbeda beda, di mana sebelum terbentuk nya kecamatan sentajo raya masyarakat sangat sulit berurusan karena letak ibukota kecamatan sangat jauh di tambah lagi dengan kondisi jalan yang rusak yang pelayanan yang berbelit belit. Setelah terbentuk nya kecamatan sentajo raya ini pelayanan yang kurang efektif itu agak sedikit berkurang walaupun masih ada pelayanan- pelayanan yang membutuhkan perhatian serius.

Dalam pembangunan pada kecamatan sentajo raya sebelum pemekaran kecamatan seperti pembangunan jalan belum ada yang selesai dan pembangunan gedung sekolah masih ada yang kurang pada setiap desa, yang membutuhkan gedung sekolah seperti gedung sekolah TK, harapan masyarakat setelah pemekaran yaitu bertambah nya bangunan yang di butuhkan masyarakat seperti, gedung sekolah, puskesmas, pasar, jalan, begitu juga dengan kator desa.

Dalam pengelolaan potensi daerah pada kecamatan senjata raya ini, potensi daerah di kecamatan ini seperti tani karet, tani sawah, dan kebun sayur-sayuran. Setelah pemekaran semakin di perhatikan dan semakin meningkat. Dan pada saat sekarang penambangan emas begitu banyak tapi illegal, karena dengan penambangan emas ini banyak membuat warga tidak nyaman sebab membuat air di kuantan menjadi keruh, dan suara mesin nya yang membuat warga tidak nyaman.

Hal ini terlihat dalam penyelesaian urusan yang di inginkan masyarakat masih keluar dari standard dan pedoman pelaksanaan pemerintah yang ada di kecamatan sentajo raya ini. Sumber-sumber utama pendapatan daerah secara umum dapat dilihat pada data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dapat dirinci ke masing-masing sektor dan subsektor. Dengan demikian, akan diketahui potensi, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari PDRB sektoral. Jadi, bisa dikatakan PDRB dapat menggambarkan potensi daerah dalam dua aspek yaitu aspek ekonomi juga termasuk sumber daya alam dilihat dari produksinya. Untuk menentukan nilai PDRB suatu daerah yaitu :

- 1) Sektor pertanian
- 2) Sektor pertambangan dan penggalian
- 3) Sektor industri pengolahan
- 4) Sektor Konstruksi (Bangunan)
- 5) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
- 6) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
- 7) Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

Untuk pengelolaan potensi daerah dalam kecamatan ini seperti ada nya pasar, sebelum pemekaran kecamatan ini masyarakat sangat kesusahan untuk belanja memenuhi kebutuhan sehari-hari meski harus menempuh jarak beberapa kilo meter dulu dari desa, sekarang dengan di mekarkan nya kecamatan ini masyarakat sentajo raya ini dengan mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari karena sudah ada pasar di kecamatan ini, selain pasar pengelolaan potensi daerah ini juga ada retribusi dan sumber daya alam, salah satu contoh nya yaitu seperti adanya pungutan retribusi parkir di pasar, dan juga sumber daya alam nya seperti penghasilan padi setiap tahun nya, dan juga penghasilan sayur-sayuran.

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas maka penulis akan menjadikan daerah ini sebagai objek yang akan di teliti dengan judul : “Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pasca Pemekaran Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana dampak sosial ekonomi Pasca pemekaran Kecamatan Sentajo Raya di Kabupaten Kuantan Singingi ?

1.3 .Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dampak sosial ekonomi Pasca pemekaran Kecamatan Sentajo Raya di Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis dapat memperluas dan memperkaya wawasan ilmiah tentang dampak sosial ekonomi.
2. Sebagai penambahan referensi bagi pneliti lain tentang permasalahan yang akan datang.
3. Sebagai wujud implementasi teori-teori yang di dapatkan di bangku perkuliahan khusus di bidang administrasi Negara.

1.5. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan ini akan dipaparkan dalam lima pokok bahasan, dan dari masing-masing pokok bahasan akan dibagi kedalam sub-sub sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori ini menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan permasalahan yang akan di bahas oleh peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan tentang jenis penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, metode pengumpulan data, dan Analisa Data.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang keadaan Umum desa rantau sialang kecamatan kuantan mudik kabupaten kuantan singingi.

BAB V PEMBAHASAN

Di dalam bab ini memuat hasil dari penelitian yang dilakukan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.